

Peningkatan Alokasi Anggaran Militer Negara-Negara di Timur Tengah dan Pengaruhnya terhadap Eskalasi Konflik Kawasan

Endro Tri Susdarwono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban Brebes
saniscara99midas@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss how military budget allocations for countries in the Middle East affect the escalation of conflicts in the region, how military budget allocations must compete between countries in the area, and how military budget allocations have a relationship and influence with each other. This study uses quantitative methods, namely statistical tests with canonical correlation analysis, to answer the relationship and impact between military budget allocations among countries in the Middle East. The results of canonical weight and canonical loading functions 1 and 2 show a significant relationship between the dependent variate and the independent variate or military budget allocation in Iran, Israel, Saudi Arabia, and Turkey and military budget allocations in seven other countries in the Middle East. The existence of competition in the distribution of military budgets in Middle Eastern countries affects the escalation of conflicts in this region because the preparation of the budget is based on threats. The funding for defense is a concern and consideration for friendly or unfriendly neighboring countries.

Keywords: conflict, Middle East, military budget allocation, threat

Abstrak

Tujuan penelitian ini membahas mengenai bagaimana peningkatan alokasi anggaran militer negara-negara di Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap eskalasi konflik di kawasan, bagaimana alokasi anggaran militer harus berkompetisi antara negara di kawasan, serta bagaimana antara alokasi anggaran militer yang satu dengan lainnya saling mempunyai hubungan dan pengaruh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu uji statistik dengan analisis korelasi kanonikal untuk menjawab tentang hubungan dan pengaruh antara

alokasi anggaran militer di antara negara-negara di Timur Tengah. Dari hasil *canonical weight* maupun *canonical loading* fungsi 1 dan 2 dapat disimpulkan memang terdapat hubungan signifikan antara *dependent variate* dengan *independent variate* atau alokasi anggaran militer di negara Iran, Israel, Saudi Arabia dan Turki dan alokasi anggaran militer di tujuh negara lain di Timur Tengah. Adanya kompetisi alokasi anggaran militer di negara Timur Tengah mempengaruhi eskalasi konflik di kawasan ini disebabkan penyusunan anggaran tersebut didasarkan pada ancaman. Anggaran untuk pertahanan menjadi perhatian dan pertimbangan negara tetangga bersahabat ataupun yang tidak bersahabat.

Kata Kunci: alokasi anggaran militer, ancaman, konflik, Timur Tengah

Pendahuluan

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat kaya sumber energi fosil, yaitu minyak dan gas. Kedua komoditi utama kawasan ini merupakan objek kepentingan dari semua kekuatan dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Timur Tengah seolah tidak pernah lepas dari perang selama beberapa dekade terakhir, antara lain Perang Iran-Irak (1980-1988), perang koalisi AS melawan Irak (1991 dan 2003), Perang Israel melawan milisi Palestina di Gaza (2008-2009, 2012, 2014, dan 2021), dan perang di Lebanon (1982 dan 2006). Sejak 2011, Timur Tengah bergolak menuntut demokratisasi di hadapan rezim-rezim yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Fenomena yang disebut *Arab Spring* itu juga menjadi fokus dalam memahami dinamika Timur Tengah ini. *Arab Spring* diawali dengan penggulingan rezim di Tunisia (2010) dan Mesir (2011), berlanjut di tahun 2011 dengan terjadinya penggulingan Qaddafi oleh milisi bersenjata lokal yang dibantu NATO, dan yang patut menjadi keprihatinan adalah terjadinya perang berkepanjangan di Suriah (mulai 2011 hingga kini), serta agresi Arab Saudi ke Yaman (sejak 2015 hingga kini).

Ada dua masalah rumit di Timur Tengah yang menjadi akar konflik, yaitu perebutan sumber daya minyak dan gas, serta keberadaan Israel yang mengorbankan penduduk Palestina (Hinnebusch, 2003:154). Sehubungan dengan masalah minyak, Eropa Barat telah menggantungkan ekonominya pada minyak di Timur Tengah. Di masa-masa keemasan imperialisme Inggris dan Perancis, negara-negara Timur Tengah dipaksa oleh kekuatan militer imperialis untuk memberi izin eksplorasi sumber daya alam mereka kepada kepentingan kapitalis Barat. Tapi masa itu sudah berlalu. Kemerdekaan negara-negara Timur Tengah seiring dengan munculnya nasionalisme Arab membuat

Barat tidak lagi leluasa melakukan eksploitasi minyak. Mereka harus memberi konsensi ekonomi dan politik agar pemerintah negara-negara Timur Tengah tetap bersedia menjual minyak mereka kepada Eropa Barat.

Sementara itu, keberadaan Israel merupakan penyebab lain mengapa Timur Tengah seolah tidak sepi dari konflik. Israel dideklarasikan pada 14 Mei 1948 setelah melalui sebuah proses politik di PBB, yaitu resolusi 181 tahun 1947 yang memberikan 55% tanah Palestina kepada kelompok Yahudi untuk mendirikan negara khusus Yahudi. Berdasarkan resolusi tersebut, milisi-milisi Yahudi-Zionis melakukan pengusiran-pengusiran kepada warga Palestina yang semula mendiami kawasan 55% tersebut. Saat itu terjadilah pengungsian besar-besaran warga Palestina, disertai beberapa kejadian pembantaian massal (britannica.com, t.t.).

Berbagai perang yang terjadi di Timur Tengah merupakan dampak dari didirikannya negara Israel tahun 1948. Sehari setelah deklarasi Israel, lima negara Arab menyerbu Palestina dan menduduki wilayah yang ditetapkan oleh PBB sebagai Palestina. Tujuan penyerbuan ini adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban (*law and order*) pasca keluarnya Inggris dari kawasan, melindungi warga Arab Palestina (yang menjadi korban pembantaian massal oleh milisi Zionis), dan menghentikan aliran pengungsi Palestina ke negara-negara sekitar (britannica.com, t.t.). Perang 1948 dimenangkan oleh Israel yang memukul mundur pasukan Arab.

Selanjutnya, perang 1956 terjadi antara Israel dan Mesir. Perang diawali oleh keputusan Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, yang menasionalisasi Terusan Suez yang semula dikuasai Prancis dan Inggris. Untuk merespon perkembangan ini, kedua negara eks-imperialis tersebut menjalin perjanjian dengan Israel yang juga dirugikan oleh nasionalisasi Suez. Pasalnya, Nasser sangat menentang Israel dan kapal Israel dilarang menggunakan terusan Suez. Israel, dengan didukung Prancis dan Inggris, menyerang Mesir. Perang berakhir dengan kekalahan Mesir, dimana Semenanjung Sinai diduduki oleh Israel, sementara Terusan Suez kembali dikuasai Prancis dan Inggris (britannica.com, t.t.).

Perang-perang selanjutnya antara Israel dan negara Arab terjadi pada tahun 1967 (Perang Enam Hari) yang membuat Israel menduduki seluruh kawasan Palestina. Tahun 1973 terjadi perang Yom Kippur War dipicu oleh aksi Israel yang melewati Terusan Suez dan memasuki Golan. Selama Perang Arab-Israel 1973 ini, negara-negara Arab anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memberlakukan embargo terhadap Amerika Serikat sebagai pembalasan atas keputusan AS untuk menyuplai persenjataan kepada Israel. Embargo juga diberlakukan kepada negara-negara lain yang

mendukung Israel, di antaranya Belanda, Portugal, dan Afrika Selatan (history.state.gov, t.t.).

Demikian seterusnya, hingga kini terjadi berbagai perperangan di Timur Tengah yang selalu melibatkan Israel dan perebutan minyak. Menurut Hinnebusch (2003:154), perperangan di Timur Tengah selalu berkaitan antara Israel dan minyak, "*Conflicts over Israel and oil have tended to feed on each other.*" Amerika Serikat merupakan negara pendukung utama Israel, namun kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah sangat terkait dengan minyak. Ada tiga strategi yang diberlakukan AS di Timur Tengah demi menjaga pasokan minyak, yaitu dengan memperkuat militernya di kawasan, terutama setelah memburuknya hubungan AS-Iran pasca Revolusi Islam 1979; menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara kerajaan yang memiliki cadangan minyak yang besar, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab; dan mendominasi proyek-proyek migas di kawasan melalui tangan korporasi-korporasi AS (Pradana & Yulianti, 2017: 107-108).

Hampir semua konflik yang terjadi di dunia terhubung dengan adanya peningkatan alokasi anggaran militer atau pertahanan, disebabkan bahwa peramalan (*forecasting*) dan penyusunan alokasi anggaran militer selalu dikaitkan dengan ancaman yang ada di kawasan dan cara pandang terhadap negara-negara tetangga yang ada dalam kawasan, dalam hal ini Kawasan Timur Tengah. Dilema terhadap keamanan dalam sepanjang sejarah sangat lekat dirasakan di wilayah Timur Tengah sebagai wilayah yang kerap kali diwarnai konflik dan wacana perperangan. Ancaman terhadap kedaulatan negara di Timur Tengah lainnya dapat dipicu oleh baku tembak yang terjadi di belahan negara lain di kawasan ini (Falahi, 2012: 189-205). Konflik tersebut bisa terjadi secara internal (misalnya etnis Kurdi Turki versus pemerintah Turki), namun bisa juga berupa konflik antara negara, seperti Irak-Kuwait atau Irak-Arab Saudi (Surwadono, 2013).

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penemuan sumber daya alam baru sangat meningkatkan risiko konflik, terutama jika sumber daya tersebut adalah minyak. Hal ini dapat terlihat dari adanya kecenderungan peningkatan dalam pengeluaran militer dan impor senjata setiap kali terjadi penemuan sumber minyak baru. Kenaikan harga migas sudah tentu meningkatkan pendapatan negara, namun sebagiannya dikeluarkan lagi oleh negara untuk membeli persenjataan dan meningkatkan postur militernya (Ali & Abdellatif, 2013).

Setiap negara tentu saja bebas untuk membelanjakan uang negara untuk keperluan pertahanan sesuai dengan kemampuan dan tujuannya, oleh sebab itu, definisi belanja pertahanan bisa sangat bervariasi. Pembelanjaan uang negara untuk keperluan pertahanan antara satu negara dengan negara lain dapat saja berbeda.

Adakalanya suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya mengubah sistem pembelanjaan uang negara oleh sebab tertentu. Namun demikian, ada beberapa negara yang memasukkan belanja barang dan jasa secara umum sebagai belanja pertahanan, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, IMR, dll. Setiap negara perlu melakukan peramalan (*forecasting*) anggaran belanja pertahanannya.

Dalam artikel ini, penulis akan melakukan analisis untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana peningkatan alokasi anggaran militer negara-negara di Timur Tengah dan pengaruh terhadap eskalasi konflik Kawasan, bagaimana alokasi anggaran militer harus berkompetisi antara negara di Kawasan Timur Tengah serta bagaimana antara alokasi anggaran militer yang satu dengan lainnya saling mempunyai hubungan dan pengaruh.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif, dengan melakukan analisis ekonomi yang memanfaatkan pendekatan statis untuk melihat masalah pertahanan berdasarkan kurun waktu tertentu dengan menggunakan pendekatan *cross-sectional*, sedang analisis dinamis melihat kerangka waktu dengan menggunakan *times-series* yang mempengaruhi berbagai variabel pertahanan. Penggambaran penalaran ekonomi menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan grafik dua-dimensi atau tiga-dimesi untuk mengilustrasikan hubungan teoretis. Penulis juga melakukan analisis data dengan menggunakan analisis uji statistik korelasi kanonikal. Analisis korelasi kanonikal merupakan model statistik multivariat yang digunakan untuk menguji hubungan (korelasi) antara lebih dari satu set variabel dependen dan lebih dari satu set variabel independen. Pada analisis regresi berganda kita hanya memprediksi satu variabel dependen dengan lebih dari satu set variabel independen, sementara itu korelasi kanonikal secara simultan memprediksi lebih dari satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2013).

Peran Peramalan (*Forecasting*) dalam Strategi Militer

Secara umum, dilihat dari segi manajemen militer dan pemerintah, perekonomian dan kepentingan kebijakan publik, peramalan memiliki arti yang sangat penting. Pertama, peramalan merupakan instrumen penting untuk rencana organisasi jika dikaitkan dengan proyeksi anggaran belanja dalam jangka panjang. Peramalan akan

menjadi kerangka pemikiran sangat penting dalam pembuatan rencana jangka panjang jika penjualan produk militer akan dijadikan sebagai prioritas. Peramalan bisa memberikan penekanan terhadap berbagai masalah yang muncul jauh sebelumnya jika yang diproyeksikan merupakan persoalan terhadap pangsa pasar militer yang mempunyai pertumbuhan lambat. Kedua, disebabkan naik turunnya anggaran militer dilihat secara umum akan mempunyai dampak terhadap perekonomian, sehingga peramalan terhadap anggaran belanja militer menjadi *trend* bagi pelaku ekonomi terutama pihak-pihak yang berkepentingan dengan keseluruhan aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, penggunaan teknologi militer pada masa damai, persoalan kebijakan pajak guna mendukung pertahanan, serta pola hubungan pemerintah dengan para pengusaha seringkali dipengaruhi oleh anggaran militer (Bakrie, 2007: 44).

Permasalahan anggaran dan keuangan (*management of defense budget and financial*), hingga saat ini persoalan anggaran pertahanan selalu kurang, pemahaman anggaran (*budget*) masih merupakan *stick and carrot* atau *gun and butter*, terutama bagaimana agar *stick* dan *gun* mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan *carrot* dan *butter*. Anggaran untuk pertahanan menjadi perhatian dan pertimbangan pemangku kepentingan, seperti misalnya politisi, pembayar pajak (rakyat), media, LSM, kementerian, pihak militer, dan sektor keamanan. Tetapi juga yang menjadi pertimbangan adalah negara tetangga bersahabat ataupun yang tidak bersahabat, atau organisasi internasional (Supriyatno, 2014: 101).

Pada dasarnya anggaran pertahanan harus keluar angkanya berdasarkan situasi ancaman. Walaupun kenyataannya, anggaran pertahanan dirancang tidak berdasarkan pada ancaman, namun berdasarkan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya suatu negara. Konsekuensinya, apabila mendiskusikan masalah anggaran dan finansial diperlukan adanya eksaminasi seluruh aspek-aspek finansial lain non-pertahanan untuk menyiapkan keamanan nasional. Untuk itulah, diperlukan penjelasan kepada warga negara, bahwa keamanan nasional (baik internal maupun eksternal), termasuk pertahanan merupakan sebuah “barang publik” atau “*a public good*” yang merupakan keniscayaan bagi eksistensi, keadilan dan keselamatan negara agar dapat melaksanakan pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan rakyat. Untuk itulah, rakyat harus membayar untuk pertahanan dan keamanan. Apabila anggaran ini telah menjadi uang (*finance*) yang diterimakan oleh kementerian pertahanan, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengatur pengeluaran atau pembelanjaan (*spending*), misalnya pembelian alutsista, kesejahteraan SDM, dan pembelanjaan lainnya (Supriyatno, 2014: 102).

Belanja pertahanan adalah biaya untuk membangun kekuatan pertahanan dalam masa perang dan damai (Hartley & Sandler, 1995: 1-20). Belanja pertahanan pada

dasarnya untuk biaya pembayaran gaji personel pertahanan, biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya sarana pertahanan dalam kurun waktu tertentu. Belanja pertahanan selalu terkait dengan kegiatan yang dilakukan dalam lingkup pertahanan dan keamanan, serta kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi dinamika ancaman yang dihadapi suatu negara. Kegiatan pertahanan juga meningkat tidak hanya sebatas membangun kekuatan untuk berperang saja atau Operasi Militer untuk Perang (OMP), tetapi juga mencakup Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk juga untuk memerangi ancaman nontradisional seperti CBRN-E, terorisme dan serangan terhadap dunia maya (*cyber attack*). Belum lagi negara yang sering dilanda bencana alam akan menampilkan personel militer untuk terjun pertama ke daerah bencana sampai kemudian melakukan rehabilitasi. Ada hal yang menarik perhatian institusi-institusi tingkat dunia terhadap belanja pertahanan, sehingga pembiayaan pertahanan penting untuk dibahas secara khusus. Biaya yang dikeluarkan untuk pertahanan juga dapat dianggap sebagai biaya peluang (*opportunity cost*) untuk pengeluaran pada sektor non-pertahanan (Yusgiantoro, 2014: 682).

Menurut laporan tahunan *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)* anggaran pertahanan global mencapai US\$1,917 triliun pada 2019, peningkatan 3,6 persen dari angka tahun sebelumnya dan peningkatan terbesar dalam satu tahun sejak 2010 (SIPRI, 2020). Secara regional, pengeluaran militer meningkat di Eropa sebesar 5 persen, Asia dan Oseania sebesar 4,8 persen, Amerika sebesar 4,7 persen, dan Afrika sebesar 1,5 persen. Gabungan pengeluaran militer oleh 29 negara anggota NATO adalah US\$1,035 triliun pada 2019 (SIPRI, 2020). Secara umum pada tahun 2020 terjadi kenaikan terhadap anggaran pertahanan global yaitu dari 1,9% menjadi total US\$ 1,93 triliun. Kenaikan yang terjadi hampir menyentuh US\$ 180 miliar dari US\$ 1,75 triliun pada 2010 (SIPRI, 2020). Namun menurut Jane's Information Group memperkirakan, diakibatkan krisis yang disebabkan pandemi virus Covid akan terjadi perlambatan pada tahun 2021 terhadap pertumbuhan belanja pertahanan global. Terkecuali di Eropa, Amerika Latin, dan Asia-Pasifik dari semua wilayah, penerapan pengurangan nyata terhadap belanja pertahanan kemungkinan akan terjadi di tahun 2021. Penurunan terhadap pengeluaran pertahanan akan menjadi tingkat terendah sejak 2013 (MacDonald, 2020). SIPRI melaporkan pada tahun 2019 bahwa anggaran pertahanan yang dikeluarkan Amerika Serikat, China, Arab Saudi, India, dan Perancis mencapai 60 persen total anggaran pertahanan global.

Analisis Korelasi Kanonikal

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis korelasi kanonikal yang memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Menentukan apakah dua set variabel tidak berhubungan satu sama lainnya (independen) atau sebaliknya menentukan besarnya/kuatnya hubungan antara dua set variabel tersebut.
2. Menentukan nilai tertimbang dari masing-masing set variabel dependen dan independen sehingga dapat kombinasi linear dari set variabel yang memberikan korelasi maksimum.
3. Menjelaskan sifat hubungan bila ada antara set variabel dependen dan set variabel independen, umumnya diukur dengan kontribusi relatif dari masing-masing variabel terhadap fungsi kanonikalnya (Ghozali, 2013: 368).

Berikut ini ilustrasi analisis korelasi kanonikal anggaran militer beberapa negara di Timur Tengah.

Tabel 1. Ilustrasi Analisis Korelasi Kanonikal

Alokasi Anggaran Militer		Alokasi Anggaran Militer
1. Oman		1. Iran
2. Lebanon		2. Israel
3. Kuwait		3. Saudi Arabia
4. Yordania		4. Turki
5. Irak		
6. Mesir		
7. Bahrain		
Komposit Variabel Dependen	<i>Canonical Correlation</i>	Komposit Variabel Independen
<i>Dependent canonical variate</i>		<i>Independent canonical variate</i>

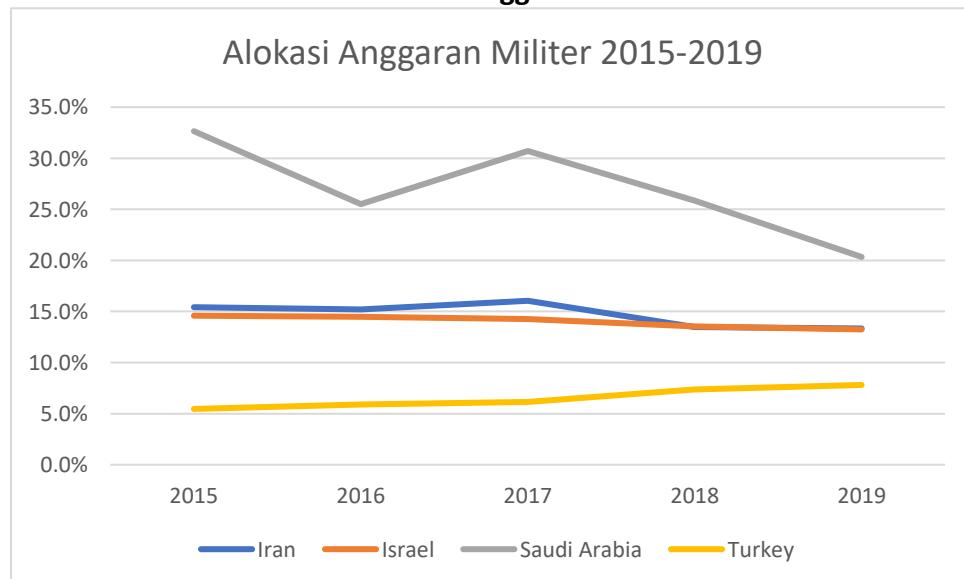
Dua variabel dependen akan dibuat menjadi satu komposit *dependent canonical variate* dan dua variabel independen akan dibuat menjadi komposit *Independent canonical variate*. *Variate* yang dimaksud disini adalah pasangan kombinasi linier sedangkan hubungan di antara pasangan tersebut disebut korelasi kanonikal. Korelasi kanonikal (Rc) akan mengukur kuatnya hubungan antara dua set multiple variabel (*canonical variates*). *Canonical variate* menggambarkan kombinasi linear optimal antara variabel dependen dan independen, sedangkan *canonical correlation* (Rc) menggambarkan kuatnya hubungan antar kedua variabel tersebut.

Alokasi Anggaran Militer/Pertahanan

Standar anggaran untuk setiap negara tidak selalu sama. Setiap negara cenderung mendefinisikan anggaran pertahanan sesuai dengan keperluan dan kepentingannya. Hal ini, menyebabkan perbandingan internasional pembiayaan pertahanan menjadi sulit. Nicole Ball (1984) yang melaksanakan studi terperinci tentang anggaran dari sejumlah besar negara berkembang menyimpulkan bahwa sering terjadi perubahan dalam praktik penganggaran, sehingga perbandingan antarnegara menjadi agak sulit. Terdapat beberapa standar mengenai anggaran pertahanan negara yang dibuat dalam skala global oleh PBB, IMF, Bank Dunia, dan NATO. Standar PBB tentang anggaran pertahanan ditetapkan dalam Sidang Umum Desember 1980, dalam Resolusi Nomor 35/142 B, berjudul *Reduction of Military Budgets*. Standar ini ditetapkan khusus untuk tujuan perbandingan anggaran pertahanan antarnegara. Belanja pertahanan dibedakan menurut komponen utama dan menurut matra, sehingga jumlahnya ada 588 pos anggaran. Jumlah negara yang melaporkan datanya terus meningkat, dari kurang lebih empat puluhan negara pada awal 1990 menjadi delapan puluhan negara pada saat ini, dengan berbagai perincian. Data yang lebih terinci dimiliki negara-negara barat, sedangkan negara-negara berkembang umumnya hanya melaporkan angka secara umum.

Berikut grafik alokasi anggaran militer di negara Iran, Israel, Saudi Arabia dan Turki pada tahun 2014-2019.

Grafik 1. Grafik Alokasi Anggaran Militer 2015-2019

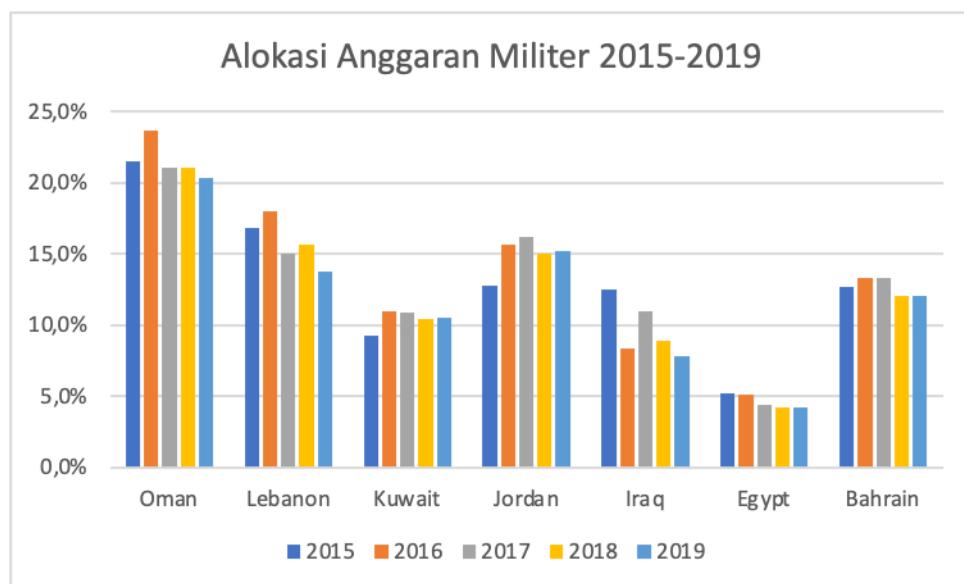


Sumber: SIPRI dan diolah Peneliti

Bank Dunia pada tahun 1998 menetapkan *Principles of Good Budgeting: Comprehensiveness, Predictability, Contestability, Transparency, Periodicity* (Supriyatno, 2014: 184). Demikian juga IMF pada tahun 1998 menetapkan pedoman serupa, yaitu *Code of Good Practice on Fiscal Transparency: Clarity of Roles and Responsibilities, Public Availability, Open Budget Preparation, Execution and Reporting, Independent Assurances of Integrity*. Definisi IMF tersebut memberikan dasar bagi beberapa data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia dalam *World Development Report*, serta IMF dalam Statistik Keuangan Pemerintah (SKP). Belanja pertahanan adalah salah satu elemen dari SKP yang membahas berbagai sektor, oleh sebab itu pembahasan sektor pertahanan tidak begitu intensif.

Berikut grafik alokasi anggaran militer di negara Oman, Lebanon, Kuwait, Yordania, Irak, Mesir dan Bahrain pada tahun 2014-2019.

Grafik 2. Grafik Alokasi Anggaran Militer 2015-2019



Sumber: SIPRI dan diolah Peneliti

Berbagai definisi standar tersebut tidak terlihat banyak berbeda. Namun demikian, secara umum bisa sangat berbeda jika ada pos pengeluaran yang sifatnya strategis, sehingga perbedaan antar definisi nasional dengan definisi standar oleh lembaga-lembaga internasional tersebut cukup besar. Definisi PBB adalah yang paling komprehensif dibandingkan definisi lain. Namun, akibatnya sejumlah negara mengalami kesulitan untuk melaporkan data anggaran pertahanan sesuai standar PBB, sehingga mereka membuat dua versi yang berbeda, yaitu sesuai standar umum yang biasa dipakai negara-negara dan standar PBB.

Standar anggaran pertahanan juga dibuat oleh beberapa kelompok negara, seperti yang dibuat NATO. Definisi NATO dibuat untuk tujuan internal, namun diadopsi oleh lembaga-lembaga lain, seperti *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, dan Badan Pengendalian Senjata dan Pelucutan Senjata Amerika Serikat atau *Arms Control and Disarmament Agency (US ACDA)*. Definisi NATO menjadi ukuran yang cukup komprehensif tentang beban keuangan dari operasi militer.

Selain perbedaan definisi, ada juga penggunaan uang negara di luar anggaran (*off budget*), misalnya melalui rekening khusus. Belanja pertahanan dapat berasal dari ekspor bahan mentah, seperti tembaga atau minyak, yang ditukar senjata melalui sistem barter. Ada juga kasus dimana kontrol anggaran sedemikian buruk, sehingga tidak mungkin untuk menggali data belanja pertahanan, seperti yang terjadi di Argentina pada awal tahun 1980. Data resmi yang tidak dilaporkan untuk belanja pertahanan dapat mencapai 50% dari anggaran resmi.

Berbagai kepentingan terhadap data belanja pertahanan yang digunakan untuk berbagai tujuan, telah mendorong sejumlah lembaga internasional untuk menerbitkan data belanja pertahanan secara rutin, di antaranya:

1. PBB menghimpun data dari negara-negara yang menjawab kuesioner yang dikirimkan setiap tahun, termasuk belanja pertahanan. Data belanja pertahanan yang dilaporkan dalam publikasi tahunan PBB ini adalah dalam mata uang nasional negara masing-masing.
2. IMF menerima data belanja pertahanan dari negara-negara anggotanya sesuai dengan definisi yang ditetapkannya. Karena praktik birokrasi pada beberapa negara, data belanja pertahanan yang diterbitkan IMF kemungkinan lebih kecil daripada pengeluaran yang sebenarnya. Buku Tahunan Statistik Keuangan Pemerintah melaporkan belanja pertahanan dari setengah lebih negara-negara anggota IMF.
3. *World Economic Outlook* yang diterbitkan IMF juga memuat data belanja pertahanan sebagian besar negara-negara anggotanya.
4. *National Statistics Account* PBB juga memuat data yang diberikan oleh negara-negara anggotanya.
5. Dalam menyusun Laporan Pembangunan Manusia, UNDP (*United Nation for Development Program*) mengumpulkan data belanja pertahanan dari berbagai sumber, termasuk IMG, Sivard dan SIPRI.
6. Pemerintah Amerika Serikat juga mengumpulkan data belanja pertahanan negara lain. Data ini sering digunakan untuk mempertimbangkan pemberian bantuan kepada negara-negara tersebut. Lembaga yang terlibat antara lain, kedutaan besar AS di seluruh dunia, *US Agency for International Development*

(USAID), CIA, dan Badan Intelijen Pertahanan atau *Defense Intelligence Agency* (DIA). Publikasi Pemerintah AS lainnya berasal dari pengeluaran militer dunia dan transfer senjata yang diterbitkan oleh US ACDA. Ini adalah data yang paling komprehensif dari semua sumber data yang tersedia.

7. SIPRI menyajikan informasi tentang belanja pertahanan dari sejumlah besar sumber yang tersedia untuk publik, seperti media cetak, jurnal militer khusus, publikasi pemerintah, dan data anggaran negara. Data yang disajikan dalam mata uang nasional atas dasar harga berlaku dan harga konstan dengan menggunakan deflator Indeks Haga Konsumen (IHK) dan tingkat pasar valuta asing.
8. Ruth Sivad selama beberapa waktu telah menebitkan brosur termasuk data belanja pertahanan, di mana datanya sebagian besar diambil dari sumber lain seperti data IMF, SIPRI, dan US ACDA. Namun, karena sebagian negara tidak mempunyai data belanja pertahanan, maka dibuat perkiraannya, di antaranya Uni Soviet. Dalam setiap publikasi dilaporkan data umum selama beberapa tahun dan data terperinci selama satu tahun dalam dollar AS.
9. *International Institute of Strategic Studies (IISS)* yang berbasis di London menyajikan data tentang anggaran pertahanan dalam *military balance*. Angka-angka ini merupakan proyeksi pengeluaran untuk tahun fiskal berjalan seperti yang dilaporkan ke IISS oleh beberapa negara.

Dalam beberapa kasus terdapat perbedaan besar antar sumber data satu dengan sumber data yang lain. Penyebabnya adalah adanya perbedaan dalam metode mengukur deflasi, penggunaan konversi mata uang, tingkat manipulasi data untuk mencerminkan definisi, koreksi untuk perbedaan dalam tahun fiskal. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan adanya latar belakang politik, sehingga tidak semua data dipublikasikan atau disampaikan secara terbuka.

Lingkup pengeluaran untuk fungsi-fungsi pertahanan, seperti untuk pertahanan negara, pencegahan terhadap serangan militer, dan perang akan lebih langsung menunjukkan untuk apa uang negara akan digunakan. Namun, untuk kemudahan pencatatan anggaran, seringkali pengeluaran pemerintah untuk pertahanan tidak dikelompokkan menurut fungsi-fungsi tersebut, melainkan menurut garis birokrasi. Pada beberapa negara, pengelompokan anggaran ini mungkin berbeda dan disesuaikan dengan tujuan fungsi pemerintahan masing-masing, misalnya pengeluaran untuk kepolisian di beberapa negara berada di bawah anggaran Kementerian Dalam Negeri, dan bantuan militer untuk negara lain berada di bawah anggaran kementerian Luar Negeri, sementara pengadaan senjata atau alutsista berada di bawah anggaran

Kementerian Perindustrian. Jadi, walaupun semua pengeluaran tersebut terkait dengan belanja pertahanan, tetapi ada kemungkinan masuk dalam pos instansi yang berbeda-beda.

Dengan berbagai alasan, jumlah ekspor senjata sedunia dapat tidak sama dengan jumlah pengeluaran impor senjata sedunia. Pendekatan fungsional umumnya juga tidak memasukkan anggaran untuk pensiun dan tunjangan veteran. Namun dalam praktiknya, birokrasi pertahanan seringkali mengurus tunjangan-tunjangan sosial tersebut. Pengeluaran pada masa depan, seperti pengadaan senjata secara kredit, sering tidak ditemukan dalam anggaran pertahanan. Pengeluaran ini dicatat pada dokumen anggaran pertahanan hanya selama satu tahun di mana pembayaran bunga dan pokok terjadi. Tetapi dalam banyak kasus, utang untuk keperluan pertahanan digabung dengan utang untuk tujuan lain, sehingga tercampur baur tidak dikenali lagi sebagai pengeluaran untuk pertahanan. Berikut adalah rincian dari Anggaran dan Pendapatan Pertahanan berdasarkan Michael Brzoska (1995),

Berikut ini rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Pertahanan (APBN).

(1) Pendapatan:

1. Penerimaan dari sekolah pertahanan, rumah sakit, dan BUMN
2. Penerimaan dari penggunaan infrastruktur pertahanan oleh sipil
3. Penerimaan transportasi perusahaan/perorangan
4. Penjualan paten, pengetahuan
5. Subsidi produksi senjata
6. Penerimaan/bantuan dari negara lain, dll.

(2) Belanja:

1. Gaji dan tunjangan untuk tentara
2. Gaji dan tunjangan untuk birokrat di Kementerian Pertahanan dan BUMN
3. Biaya untuk pelayanan kesehatan, tunjangan pajak, tunjangan-tunjangan lain
4. Biaya pengadaan dan pemeliharaan kantor, rumah dinas, asrama, dan lain-lain
5. Biaya penyelenggaraan akademi militer, pendidikan perwira, dll
6. Belanja senjata (termasuk senjata impor)
7. Biaya operasi dan pemeliharaan
8. Anggaran penelitian dan pengembangan
9. Biaya penimbunan (*storage*) barang strategis
10. Kontribusi untuk organisasi internasional (penjaga perdamaian PBB, dll)
11. Biaya untuk pengawalan pejabat negara

12. Biaya untuk pertahanan sipil
13. Biaya untuk veteran
14. Biaya untuk penangan bencana, dll.

(3) Pengeluaran masa depan: pembayaran pokok utang dan bunga

Dalam perincian anggaran dan belanja pertahanan berdasarkan Michael Brzoska di atas, dilaporkan bahwa butir-butir pendapatan dan pengeluaran dalam satu kelompok mungkin berbeda pada tiap-tiap negara. Namun, dapat dilihat bahwa belanja lebih besar dari pendapatan karena memasukkan biaya pembelian persenjataan termasuk impor, belanja pemeliharaan dan perawatan, belanja personel, biaya penelitian dan pengembangan dalam *Research, Development, Test, and Evaluation (RDT&E)*, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan sektor pertahanan. Yang menarik adalah sistem pada sektor pertahanan memungkinkan untuk menerima pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pos pengeluaran masa depan untuk pembayaran utang dan bunganya. Walaupun sulit untuk mencapai keseimbangan, tetapi dalam sistem ini semua pos pendapatan, belanja dan pengeluaran dijadikan satu, sehingga memudahkan untuk melihat keseimbangan anggarannya, termasuk defisit pada sektor pertahanannya. Berbagai negara memisahkan beberapa fungsi yang ada dalam kota Michael Brzoska ke berbagai institusi lain, sehingga sulit dimasukkan dalam satu pos anggaran dan belanja pertahanan. Memang pada akhirnya sistem ini tergantung dari sistem yang lebih makro, yaitu terkait dengan kebijakan anggaran pada tiap-tiap negara.

Analisis Kanonikal Hubungan dan Pengaruh Alokasi Anggaran Militer di Timur Tengah

Fungsi kanonikal yang akan dianalisis adalah fungsi yang memberikan koefisien korelasi kanonikal yang signifikan secara statistik. Jika fungsi kanonikal lainnya tidak signifikan, maka hubungan antara variabel tidak akan diinterpretasikan. Fungsi kanonikal mana yang akan diinterpretasikan dilihat dari tiga kriteria: (1) tingkat signifikansi dari fungsi kanonikal, (2) besaran nilai korelasi kanonikal dan (3) *redundancy* ukuran untuk *prosentase variance* yang dijelaskan oleh dua data set.

Jika tiga kriteria di atas telah dipenuhi, maka langkah berikutnya adalah menginterpretasikan hasil fungsi kanonikal. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis fungsi kanonikal untuk menentukan pentingnya masing-masing variabel awal (*original*) di dalam hubungan kanonikal. Ada tiga metode yang dapat digunakan yaitu: (1) *canonical weight (standardized coefficients)*, (2) *canonical loading (structure correlations)*, dan (3) *canonical cross loading*.

***** Analysis of Variance -- Design 1 *****

Tabel 2. Analysis of Variance

EFFECT WITHIN CELLS Regression

Multivariate Tests of Significance (S = 2, M = 3, N = 1/2)

Test Name	Value	Approx. F	Hypoth. DF	Error DF	Sig. of F
Pillais	3.03482	3.59348	28.00	32.00	.000
Hotellings	19.57738	2.44717	28.00	14.00	.040
Wilks	.00173	3.35810	28.00	19.45	.004
Roys	.91494				

Note: F statistic for WILKS' Lambda is exact.

Sumber: diolah penulis

Tabel *analysis of variance* di atas memberikan uji signifikansi alternatif. Biasanya yang digunakan adalah *wilks lambda* yang menguji signifikansi dari korelasi kanonikal pertama. Hasil uji signifikansi ternyata semua uji statistik menunjukkan signifikan pada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa korelasi kanonikal pertama signifikan. Jika korelasi kanonikal pertama tidak signifikan, maka korelasi kanonikal kedua dan seterusnya juga tidak signifikan.

Tabel 3. Eigenvalues and Canonical Correlations

Root No.	Eigenvalue	Pct.	Cum. Pct.	Canon Cor.	Sq. Cor
1	10.75685	54.94529	54.94529	.95653	.91494
2	4.90268	25.04256	79.98785	.91136	.83059

3	2.61359	13.35003	93.33788	.85045	.72327
4	1.30427	6.66212	100.00000	.75234	.56602

Sumber: diolah penulis

Tabel 4. Dimension Reduction Analysis

Roots	Wilks L.	F	Hypoth. DF	Error DF	Sig. of F
1 TO 4	.00173	3.35810	28.00	19.45	.004
2 TO 4	.02035	2.87359	18.00	17.46	.016
3 TO 4	.12010	2.63984	10.00	14.00	.048
4 TO 4	.43398	2.60854	4.00	8.00	.116

Sumber: diolah penulis

Tabel 5. Canonical Weight

Canonical Weight
Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables
Function No.

Variable	1	2
X5	-.31223	-1.36209
X6	-.17650	.98389
X7	.89549	-.10017
X8	-.53842	-.54955
X9	1.14853	--1.34775
X10	-1.65991	.00576

X11	-.38614	-.70199
-----	---------	---------

Standardized canonical coefficients for COVARIATES

CAN. VAR.

COVARIATE	1	2
X1	.07707	-.71408
X2	-.68503	.45487
X3	-.63202	-.66267
X4	-.23716	-.13601

Sumber: diolah penulis

Untuk Fungsi 1 pada dependen variabel terdapat empat angka korelasi tinggi dan di atas 0,5 yaitu X7, X8, X9, dan X10 sedangkan untuk variabel independent (covariate) angka korelasi di atas 0,5 hanya ada dua variabel X2 dan X3. Untuk Fungsi 2 pada dependen variabel terdapat lima angka korelasi sama tingginya dan di atas 0,5 yaitu X5, X6, X8, X9, dan X11 sedangkan untuk variabel independent (covariate) angka korelasi di atas 0,5 hanya ada dua yaitu variabel X1, dan X3.

Tabel 6. Canonical Loading

Correlations between DEPENDENT and canonical variables

Function No.

Variable	1	2
X5	.28296	-.67454
X6	-.19106	-.10191
X7	.09236	-.30170
X8	-.24673	.42121

X9	-.16607	-.25307
X10	-.31600	.02719
X11	-.32059	-.05911

Correlations between COVARIATES and canonical variables

CAN. VAR.

COVARIATE	1	2
X1	.20281	-.72704
X2	-.78421	.35726
X3	-.81638	-.48579
X4	.29013	.02641

Sumber: diolah penulis

Untuk fungsi 1 dependent variabel tidak memberikan angka canonical loading di atas 0,5. Sedangkan untuk variabel independent (covariates) angka loading di atas 0,5 ada dua yaitu X2 dengan loading -0,784, X3 dengan loading -0,816. Untuk fungsi 2 dependen variabel memberikan satu angka canonical karena di atas 0,5 yaitu X5 dengan loading -0,675. Sedangkan untuk variabel independent (covariates) angka loading diatas 0,5 ada satu yaitu X1 dengan loading -0,727.

Simpulan

Dari hasil *canonical weight* maupun *canonical loading* fungsi 1 dapat disimpulkan memang terdapat hubungan signifikan antara dependent variate dengan independent variate atau alokasi anggaran militer di 7 (tujuh) negara yang diperlakukan sebagai variabel terikat atau negara yang dipengaruhi negara lain dan alokasi anggaran militer di 4 (empat) negara yang diperlakukan sebagai variabel bebas atau yang mempengaruhi negara lain memang berkorelasi secara bersama sama dengan X1 (alokasi anggaran militer Iran), X2 (alokasi anggaran militer Israel), X3 (alokasi anggaran militer Saudi Arabia), X4 (alokasi anggaran militer Turki), X5 (alokasi anggaran militer Oman), X6

(alokasi anggaran militer Lebanon), X7 (alokasi anggaran militer Kuwait), X8 (alokasi anggaran militer Yordania), X9 (alokasi anggaran militer Irak), X10 (alokasi anggaran militer Mesir), dan X11 (alokasi anggaran militer Bahrain). Namun dari keempat variabel independent ini ada dua variabel yang mempunyai kaitan erat yaitu X2 (alokasi anggaran militer Israel) dan X3 (alokasi anggaran militer Saudi Arabia). Tanda negatif pada variabel alokasi anggaran militer Israel dan Saudi Arabia berarti semakin tinggi alokasi anggaran militer Israel dan Saudi Arabia semakin rendah alokasi anggaran militer di ketujuh negara lain yang meliputi Oman, Lebanon, Kuwait, Yordania, Irak, Mesir dan Bahrain.

Dari hasil *canonical weight* maupun *canonical loading* fungsi 2 dapat disimpulkan memang terdapat hubungan signifikan antara dependent variate dengan *independent variate* atau alokasi anggaran militer di 7 (tujuh) negara yang diperlakukan sebagai variabel terikat atau negara yang dipengaruhi negara lain dan alokasi anggaran militer di 4 (empat) negara yang diperlakukan sebagai variabel bebas atau yang mempengaruhi negara lain memang berkorelasi secara bersama sama dengan X1 (alokasi anggaran militer Iran), X2 (alokasi anggaran militer Israel), X3 (alokasi anggaran militer Saudi Arabia), X4 (alokasi anggaran militer Turki), X5 (alokasi anggaran militer Oman), X6 (alokasi anggaran militer Lebanon), X7 (alokasi anggaran militer Kuwait), X8 (alokasi anggaran militer Yordania), X9 (alokasi anggaran militer Irak), X10 (alokasi anggaran militer Mesir), dan X11 (alokasi anggaran militer Bahrain). Namun dari keempat variabel independen ini ada satu variabel yang mempunyai kaitan erat yaitu X1 (alokasi anggaran militer Iran). Tanda negatif pada variabel alokasi anggaran militer Iran berarti semakin tinggi alokasi anggaran militer Iran semakin rendah alokasi anggaran militer di ketujuh negara lain yang meliputi Oman, Lebanon, Kuwait, Yordania, Irak, Mesir dan Bahrain.

Daftar Pustaka

- Ali, H.E. & Abdellatif, O.A. (2015) Military Expenditures and Natural Resources: Evidence from Rentier States in the Middle East and North Africa. *Defence and Peace Economics*, 26 (1), 5-13, DOI: 10.1080/10242694.2013.848574.
- Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- britannica.com. (t.t.). *Arab-Israeli wars*. [online]. Dalam <https://www.britannica.com/event/Arab-Israeli-wars>. [Diakses 1 Maret 2021]
- Falahi, Z. (2012). Prospek Regionalisme Timur-Tengah Pasca-Arab Spring: Telaah terhadap Identitas Kolektif Liga Arab. *Jurnal Kajian Wilayah*, 3(2), 189-205.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartley, K. dan Sandler, T. (eds). (1995). *Introduction, Handbook of Defense Economic* Volume 1, North-Holland.
- Hinnebusch, R. (2003). *The international politics of the Middle East*. New York: Palgrave.
- Maulana, M. S. (2018). Persaingan Kekuatan Saudi Arabia (Sunni) dan Iran (Syiah) Pada Kasus Konflik Kontemporer (Suriah dan Yaman). *Jurnal Gama Societa*, 2(2), 101-109.
- Pradana, A.M.N. dan Yulianti, D. (2017). Peran Liga Arab Pada Konflik di Timur Tengah Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional. *Jurnal ICMES*, 1(2), 100-118.
- state.gov. (t.t.). *Oil Embargo, 1973–1974*. [online]. Dalam <https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo> [Diakses 1 Maret 2021]
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2020). Global military expenditure sees largest annual increase in a decade—says SIPRI—reaching \$1917 billion in 2019. <https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion> diakses 4 Mei 2020.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surwandono. (2013). Relasi Antara Tingkat Konflik di Dunia Islam Dengan Setting Geografi Politik: Studi Kasus Konflik di Kawasan Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 56-64.
- Yusgiantoro, P. (2014). *Ekonomi Pertahanan : Teori & Praktik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.